

KAJIAN IMPLEMENTASIE-GOVERNMENT PADA LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA DALAM MENDUKUNG *WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY* UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT INFORMASI

Oleh
Igif G Prihanto
Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN

ABSTRACT

E-Government, including the work plan, announced in the Plan of Action of WSIS (World Summit on the Information Society) generated to realize the information society. This study uses data based on the implementation of e-Government agency of Ditjen Aptel year 2010 are taken from: Book of Communication and Information Indonesia Whitepaper 2010. This study aims to determine whether there are differences in the implementation of e-Government in government institutions in Indonesia from the aspect of policies, institutions, infrastructure, applications and planning, and support e-Government in the WSIS to realize an information society. The method of analysis through the application of non-parametric statistics with the Friedman test. The results showed that there are significant differences in the implementation of e-Government in government institutions in Indonesia from the aspect of policies, institutions, infrastructure, applications and planning. In addition, with still adanya 48% from 27 government agencies in Indonesia that the implementation of e-Government achievements it still does not work very well, and also a decrease in e-Government ranks Indonesia at the world level (from 85 in 2004 is now ranked 109 in 2010) it can be said of e-Government implementation in government agencies in Indonesia is still low to realize information society as declared in the WSIS forum. For the implementation of e-Government needs to be improved in order to accelerate the realization of the WSIS action plan to realize the information society, by: (a) formulate policies with the development of e-Government concept is clear, (b) provide a sufficient budget and adequate standards-compliant Infrastructure international, and (c) a reliable ICT to develop human resources through formal and non formal.

Kata Kunci: *E-Government, WSIS*

ABSTRAK

E-Government termasuk rencana kerja yang dicanangkan dalam Plan of Action (World Summit on the Information Society) yang dihasilkan WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Penelitian ini menggunakan data implementasi e-Government berdasarkan instansi dari Ditjen APTEL tahun 2010 yang diambil dari: Buku Komunikasi dan Informasi Indonesia Whitepaper 2010. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan, dan dukungan e-Government dalam WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Metode analisisnya melalui penerapan statistik non parametrik dengan uji Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Disamping itu, dengan masih adanya 48% dari 27 lembaga pemerintah di Indonesia yang capaian implementasi e-Government-nya masih belum berhasil dengan baik, dan juga adanya penurunan peringkat e-Government Indonesia pada tingkat dunia (dari 85 tahun 2004 menjadi peringkat ke-109 tahun 2010) maka dapat dikatakan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia masih rendah untuk mewujudkan masyarakat informasi sebagaimana yang dideklarasikan pada forum WSIS. Untuk itu implementasi e-Government tersebut perlu ditingkatkan agar mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi, dengan cara: (a) menyusun kebijakan dengan konsep pengembangan e-Government yang jelas, (b) menyediakan anggaran yang cukup dan Infrastruktur yang memadai sesuai standar internasional, dan (c) meningkatkan SDM ICT yang handal melalui jalur formal maupun non formal.

Kata Kunci: *E-Government, WSIS*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semangat untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, masyarakat dunia di abad ke dua puluh satu ini, negara-negara di dunia secara bersama-sama melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (*UN: United Nations*) mencanangkan *Millenium Development Goals* (MDG). Pencapaian *goal* ini diharapkan dapat menjawab seluruh atau paling tidak sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh semua negara. Dalam sidang paripurna tanggal 21 Desember 2001 melalui Resolusi UN 56/183- dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak untuk memanfaatkan potensi pengetahuan dan teknologi guna mencapai MDG-mengesahkan *Resolusi Internasional Telecommunication Union (ITU) 73* mengenai WSIS (*World Summit on the Information Society*) yang diputuskan dalam *Plenipotentiary Confrence ITU* di Minnepolis tahun 1998. Selain itu dalam Resolusi UN 56/183 tersebut ditetapkan pula bahwa WSIS akan diselenggarakan dalam dua fase, yaitu yang pertama di Jenewa dan selanjutnya di Tunis¹. Baik fase WSIS Jenewa tahun 2003 maupun WSIS Fase Tunis tahun 2005 yang pada intinya untuk mencapai masyarakat informasi di tingkat dunia pada tahun 2015, menegaskan bahwa *e-Government* mendapat perhatian yang besar dalam WSIS. *E-Government* ini ternyata termasuk rencana kerja yang dicanangkan dalam *Plan of Action* yang dihasilkan WSIS Fase Jenewa².

Forum WSIS menghasilkan deklarasi prinsip-prinsip pembangunan masyarakat informasi yang mendefinisikan masyarakat informasi sebagai suatu keadaan di mana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka, sebagaimana yang telah dideklarasikan di dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari Piagam PBB, dan menghormati secara penuh serta menguatkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia³. Mengingat pentingnya keberhasilan dalam bertransformasi menjadi masyarakat informasi, masyarakat dunia melalui UN memandang perlu untuk mendeklarasikan prinsip-prinsip yang menyatukan keinginan dan komitmen bersama dalam membangun masyarakat informasi..

Dalam rangka mendukung WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pemerintah yang lebih difokuskan terhadap pelaksanaan *e-Government* antara lain dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Pengembangan *e-Government* yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Society*). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tersebut antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti: Strategi Pengembangan *e-Government* yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai Panduan tentang *e-Government*, Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Panduan rencana induk pengembangan *e-Government* lembaga, panduan

penyelenggaraan situs pemerintah daerah; Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM *e-Government*⁴.

Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Kemenkominfo pada tahun 2004 (waktu itu Depkominfo) yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan *e-Government* di tingkat pusat dan daerah. Dalam Inpres tersebut, Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun *e-Government* dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi⁵. Disamping itu, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan *e-Government* di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan: 1. lingkup dan sasaran pengembangan *e-Government* yang ingin dicapai; 2. kondisi yang dimiliki pada saat ini; 3. Strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; 4. Kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta 5. Rencana investasi yang diperlukan.

Pada dasarnya, *E-Government* bertujuan menyampaikan layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Pada umumnya, semakin banyak layanan *online* yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap *e-Government*⁶. Konsep *e-Government* adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-government to business enterprises*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G-government to government*)⁷. Pada intinya *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti: *G2C (Government to Citizen)*, *G2B (Government to Business)*, dan *G2G (Government to Government)*⁸.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, keberadaan *e-Government* di Indonesia diharapkan akan dapat memacu dengan segera dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik⁹. Kondisi ini menunjukkan bahwa ke depan penggunaan *e-Government* berarti sudah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dalam rangka mendukung WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Oleh karena itu dengan implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah maka masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik akan dapat menikmati pelayanan informasi yang lebih baik karena pelayanannya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah secara *online* tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu¹⁰.

1.2 Permasalahan

Dari latar belakang tersebut, ternyata sejak Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* terlihat bahwa adopsi *e-Government* kini semakin meningkat dari tahun ke tahun pada sebagian besar lembaga pemerintah di Indonesia, tetapi pada saat yang sama ternyata kemampuan dan kecepatan adopsi tersebut berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Untuk itu, dalam implementasi *e-Government* tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga pemerintah, karena ada sebagian lembaga pemerintah

telah melaju dengan cepat, tetapi ada juga yang masih berada pada tingkat persiapan pembuatan situs web dan situs interaktif. Permasalahan yang muncul adalah seberapa jauh implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dan bagaimana peran *e-Government* dalam mendukung WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

1.3 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia baik tingkat pemerintah pusat maupun daerah dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Disamping itu, juga mengetahui seberapa jauh peran *e-Government* dalam mendukung WSIS untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan dengan data kuantitatif untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pimpinan lembaga pemerintah di Indonesia dalam merumuskan kebijakan pengembangan dan implementasi *e-Government* di Indonesia pada masa mendatang.

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan dalam implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 *E-Government*

2.1.1 Pengertian *E-Government*

Pengertian umum *electronic government* (*e-government* = *e-gov*) adalah "Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*". Namun kenyataannya pengembangannya di tingkat pemerintahan masih jauh dari yang diharapkan¹¹.

E-Government secara umum juga dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, *e-Government* adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan¹². *E-Government* pada dasarnya memberikan layanan informasi kepada sesama insitusi pemerintah (*Government to Government, G2G*), kepada dunis bisnis (*Government to Business, G2B*) dan kepada masyarakat (*Government to Citizen, G2C*) dengan tujuan¹³, sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan informasi lengkap mengenai lembaga atau daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah, dan peningkatan kinerja proses pelayanan (peningkatan efektivitas dan produktivitas).
- b. Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (*resources*) seperti waktu, tenaga, *budget*, dan fasilitas lainnya (peningkatan efisiensi).

2.1.2 Tujuan Pengembangan *e-Government*

Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan *e-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan¹⁴, yaitu :

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

2.1.3 Strategis Pengembangan *e-Government*

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *e-Government* perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat¹⁵, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

2.1.4 Proses Implementasi *e-Government*

Menurut *Center for Democracy and Technology dan InfoDev*, proses implementasi *e-Government* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari *e-Government*. Adapun ketiga tahapan tersebut¹⁶, antara lain:

- a. *Publish*, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.
- b. *Interact*, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain.
- c. *Transact*, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara *online*, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

2.1.5 Tahapan Pengembangan *e-Government*

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *e-Government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut¹⁷ :

- a. Tingkat 1 – Persiapan, yang meliputi: pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah (misalnya menyediakan sarana *multipurpose Community Center*, Warnet, dan lain-lain), dan sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- b. Tingkat 2 – Pematangan, yang meliputi: pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- c. Tingkat 3 – Pemantapan, yang meliputi: pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- d. Tingkat 4 – Pemanfaatan, yang meliputi: pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

2.1.6 Manfaat *e-Government*

Implementasi *e-Government* pada dasarnya dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk mempermudah proses layanan, memperkenalkan potensi organisasi, meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis dan sebagainya¹⁸. *E-Government* ini membawa banyak manfaat¹⁹, antara lain :

- a. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

- b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari ke semua pihak.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, *passing grade*, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara *online* dan digunakan oleh orang tua guna memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
- d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* atau bahkan *video conferencing*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Misalnya tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

2.1.7 Hambatan atau tantangan

Karena *e-Government* selalu melibatkan uang, sumber daya manusia, informasi dan komitmen politik maka *accountability* menjadi sangat kritis²⁰. Jika dilihat dari keterangan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya *e-Government* di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *e-Government* di Indonesia²¹, yakni :

- a. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (*sharring*) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: "Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?". Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.
- b. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar *software engineering*.
- c. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *e-Government*. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
- d. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Kondisi ini terlihat dari infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata, karena masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (*budget*) untuk keperluan ini.

- e. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan *access point* yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (*public library*). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

2.2 *World Summit on the Information Society (WSIS)*

Dari latar belakang telah dikemukakan bahwa pada abad ke-21 ini, negara-negara di dunia secara bersama-sama melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (*UN:United Nations*) mencanangkan *Millenium Development Goals* (MDG). Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, *Information and Communication Technology*) dapat turut mempercepat tercapainya *Millenium Development Goals* (MDG). Oleh sebab itu dipandang perlu untuk mencapai masyarakat informasi, suatu format masyarakat yang memiliki kemampuan mengakses dan memanfaatkan ICT. Selaras dengan tujuan mencapai MDG, Negara-negara di dunia melalui UN menetapkan untuk menyelenggarakan *World Summit on the Information Society* (WSIS) dalam dua fase, yaitu WSIS fase Jenewa dan WSIS fase Tunis yang pada intinya adalah guna mencapai masyarakat informasi di tingkat dunia pada tahun 2015²².

2.2.1 WSIS di Jenewa tahun 2003

WSIS di Jenewa yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Desember 2003 adalah untuk mewujudkan Masyarakat Informasi Dunia sebagai suatu kebijakan global. Forum ini menghasilkan Rencana Kerja (*Plan of Action*) dengan objektif untuk membangun masyarakat informasi seutuhnya di tingkat negara, regional dan internasional. *Plan of Action* ini berisikan deskripsi konkrit dari upaya pembangunan masyarakat informasi seutuhnya dengan target pencapaian di tahun 2015²³. WSIS Jenewa yang merupakan forum teknologi informasi dan komunikasi dunia di bawah badan PBB ITU (*International Telecommunication Union*) telah menghasilkan deklarasi prinsip-prinsip pembangunan masyarakat informasi yang mendefinisikan "masyarakat informasi sebagai suatu keadaan di mana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka", sebagaimana yang telah dideklarasikan di dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari Piagam PBB, dan menghormati secara penuh serta menguatkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia²⁴.

Dalam deklarasi tersebut disepakati 11 prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat informasi²⁵, yang meliputi:

1. diperlukannya peran pemerintah dalam mempromosikan pembangunan telematika;
2. pentingnya infrastruktur telematika;
3. penyediaan akses kepada informasi dan ilmu pengetahuan;
4. pembangunan dan pengembangan kapasitas individu maupun kelompok;
5. perlunya membangun kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan jasa telematika;

6. perlunya menciptakan kondisi lingkungan berusaha yang menunjang implementasi *good governance*;
7. pengembangan aplikasi telematika yang bermanfaat dalam keseharian;
8. penyelarasan pembangunan telematika dengan keragaman budaya dan bahasa, identitas, serta kandungan lokal;
9. mendukung prinsip-prinsip kebebasan pers;
10. memperhatikan dimensi etik dalam masyarakat informasi;
11. tetap melanjutkan kerjasama regional maupun internasional.

WSIS juga telah sepakat untuk mencanangkan rencana-rencana aksi pada tahun 2015²⁶ sebagai berikut:

- a. Menghubungkan Desa dengan ICT dan membentuk *Community Access Point*;
- b. Menghubungkan Universitas, Akademi, tingkat SMU, tingkat SMP, dan tingkat SD dengan ICT;
- c. Menghubungkan Pusat Ilmu dan Penelitian dengan ICT;
- d. Menghubungkan Perpustakaan Umum, Pusat Kebudayaan, Museum, Kantor Pos dan Kearsipan dengan ICT;
- e. Menghubungkan Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit dengan ICT;
- f. Menghubungkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dan membuat *website* dan alamat e-mail;
- g. Mengadopsi seluruh kurikulum sekolah dasar dan menengah dalam menghadapi tantangan masyarakat informasi, harus diperhitungkan pada taraf nasional;
- h. Memastikan bahwa seluruh populasi di dunia mempunyai akses untuk pelayanan televisi dan radio;
- i. Mendorong pengembangan konten dan menempatkan pada tempatnya kondisi secara teknis dalam rangka memfasilitasi keadaan terkini dan penggunaan semua bahasa di dunia di Internet; dan
- j. Memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan ICT.

2.2.2 WSIS di Tunis tahun 2005

WSIS di Tunis yang diselenggarakan pada tanggal 16-18 Nopember 2005 dihadiri oleh 176 negara peserta yang secara resmi dibuka oleh Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali. Dalam sambutannya menekankan pentingnya kerjasama semua pelaku internasional untuk mengurangi kesenjangan masyarakat dan menjamin masyarakat informasi yang seimbang, aman dan setara. Di samping itu, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan memberikan perhatian pada masalah pengelolaan internet dan menekankan bahwa PBB akan melindungi dan memperkuat internet dan menjamin manfaatnya bagi semua pihak, dan mengharapkan masa depan masyarakat informasi global akan memperkuat pembangunan, *dignity and peace*. WSIS di Tunis tersebut dalam pelaksanaannya telah mengesahkan dua dokumen, yaitu²⁷ :

- a. *Tunis Commitment* sebagai payung komitmen politik kepala negara dalam mewujudkan masyarakat informasi. Rumusan-rumusan yang menyangkut *Tunis Commitment* telah disepakati antara lain pentingnya prinsip-prinsip *universality, indivisibility, independensi* dan inter-relasi hak-hak dasar manusia; peran dan

tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan publik; peran dan kemitraan kalangan bisnis, LSM dan kerjasama PBB dan organisasi internasional lainnya; akses pada informasi dan kerjasama iptek dalam memperkuat ekonomi dan pembangunan; peningkatan kemampuan SDM; prinsip universal dan non-diskriminasi dalam mendapatkan manfaat ICT; dan membantu dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs).

- b. *Tunis Agenda for the Information Society* sebagai pedoman operasional untuk mewujudkan masyarakat informasi yang meliputi mekanisme keuangan (*Financial Mechanism*), pengelolaan internet (*Internet governance*) dan pelaksanaan dan tindak lanjut (*Implementation and Follow-up*).

Untuk pencapaian yang lebih maksimal, WSIS fase Tunis juga melibatkan organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan UN serta organisasi-organisasi lintas negara dalam agenda rencana kerjanya²⁸. Baik WSIS fase Jenewa maupun Tunis tidak menentukan tolok ukur pencapaian masyarakat informasi. Jadi setiap negara diberi kebebasan untuk menentukan sendiri pencapaiannya terhadap masyarakat informasi, hal ini mengingat kemampuan dan kebutuhan tiap negara berbeda-beda. Yang jelas, pertemuan WSIS Jenewa maupun Tunis tersebut pada dasarnya mengharuskan seluruh negara-negara dunia untuk berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat informasi termasuk Indonesia yang pada akhirnya membuat *roadmap* atau peta serta program menuju “*Indonesia Information Society 2015*”. Salah satu ciri dari masyarakat informasi setidaknya 50 persen penduduk Indonesia sudah dapat mengakses teknologi informasi dan komunikasi.

3. METODOLOGI

3.1 Data

Kajian ini menggunakan data sekunder “pemeringkatan *e-Government* berdasarkan kementerian (lembaga pemerintah)” dari Ditjen APTEL, 2010 yang diambil dari Buku Komunikasi dan Informasi Indonesia *Whitepaper* 2010 yang dipublikasikan oleh Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika²⁹. Data tersebut merupakan hasil implementasi *e-Government* dari penghargaan *e-Government award* yang ditujukan kepada lembaga pemerintah terbaik di Indonesia, dari : aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Data tersebut memperlihatkan tingkat capaian keberhasilan lembaga pemerintah dalam implementasi *e-Government* untuk masing-masing aspek yang ditentukan dengan kategorinya melalui pemberian skor, yakni kategori sangat kurang baik (1,0 sampai dengan 1,49); kurang baik (1,5 sampai dengan 2,49); baik (2,5 sampai dengan 3,49); dan sangat baik (3,5 sampai dengan 4,0).

3.2 Metode Analisis

Data pemeringkatan *e-Government* tersebut akan diolah dan dianalisis untuk menguji perbedaan pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan dengan menggunakan penerapan statistik non parametrik melalui uji Friedman³⁰. Dalam uji Friedman ini, data kajian disusun ke dalam suatu tabel dua arah yang mempunyai n

baris dan k kolom. Baris menunjukkan subjek dan kolom menunjukkan kondisi. Selanjutnya, data kondisi untuk masing-masing subyek disusun dalam bentuk jenjang (*ranking*). Pengujian Friedman ini akan digunakan untuk menentukan apakah jumlah keseluruhan jenjang (R_j) berbeda secara nyata.

$$\chi^2_r = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k (R_j)^2 - 3n(k+1) \quad \dots\dots\dots (3-1)$$

dengan :

k adalah banyak sampel

n adalah banyak kasus dalam semua sampel

R_j adalah jumlah nilai rangking ke-j

$\sum_{j=1}^k$ adalah jumlah seluruh k sampel (kolom-kolom) mendekati distribusi Chi-Kuadrat

dengan derajat kebebasan (db)=k-1

Dengan menggunakan persamaan (3-1), apabila hasil perhitungan nilai χ^2_r ternyata lebih besar dari nilai Chi-Kuadrat (atau $\chi^2_r > \chi^2_{\alpha, k-1}$) yang tertera pada tabel Chi-Kuadrat untuk derajat kebebasan (db)=k-1 dan tingkat signifikan $\alpha=0,05$ maka H_0 ditolak pada tingkat signifikan tersebut dan H_1 diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Namun demikian, apabila terjadi sebaliknya artinya nilai $\chi^2_r \leq \chi^2_{\alpha, k-1}$ maka berarti tidak terdapat perbedaan implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Selanjutnya, untuk mengetahui peran *e-Government* dalam mendukung WSIS untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi akan dilakukan analisis deskriptif dengan cara mengetahui pengertian *e-Government* dan pengertian masyarakat informasi, keberadaan *e-Government* dalam rencana kerja WSIS Jenewa maupun Tunis, capaian *e-Government* di Indonesia, dan dukungan *e-Government* Indonesia dalam WSIS untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan dan diolah, secara umum memperlihatkan bahwa dari 27 lembaga pemerintah di Indonesia ternyata 14 lembaga tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya telah berhasil dengan baik (Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kem ESDM, Kemenristek, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemenkumhan, Kemeneg KUKM), dan 13 lembaga pemerintah lainnya justru masih kurang berhasil dengan baik (Kementan, Kemendag, Kemenkes, Kemenag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemenhut, Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenegpora).

Berdasarkan implementasinya, pencapaian kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa: (1) aspek kebijakan, ternyata 12 lembaga tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya telah berhasil dengan baik, 14 lembaga kurang baik, dan 1 lembaga sangat kurang baik; (2) aspek kelembagaan, ternyata 15 lembaga tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya telah berhasil dengan baik, dan 12 lembaga kurang baik; (3) aspek infrastruktur, ternyata 1 lembaga tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya telah berhasil dengan sangat baik, 16 lembaga baik, dan 10 lembaga kurang baik; (4) aspek aplikasi, ternyata 20 lembaga tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya telah berhasil dengan baik, dan 7 lembaga kurang baik; dan (5) aspek perencanaan, ternyata 5 lembaga tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya telah berhasil dengan sangat baik, 5 lembaga baik, dan 16 lembaga kurang baik, dan serta 1 lembaga lagi sangat kurang baik. Secara lengkap data implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari kelima aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 4-1.

**Tabel 4-1: DATA IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
BERDASARKAN LEMBAGA PEMERINTAH**

No	LEMBAGA	ASPEK IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT				
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan
1	Kemendiknas	3,41	3,25	3,39	3,25	3,56
2	Kemenkeu	3,25	3,47	3,57	3,38	3,92
3	Kemenpu	3,29	3,13	3,05	3,46	3,58
4	Kemenhan	2,83	2,84	3,14	2,86	3,50
5	Kemenperin	3,25	3,07	2,67	3,33	2,33
6	Bappenas	2,71	2,67	2,81	3,08	3,08
7	Kemenakertrans	2,84	2,70	2,57	2,59	3,60
8	Kemensos	2,83	2,80	3,05	3,00	1,92
9	Kem ESDM	2,46	3,07	2,57	2,92	2,50
10	Kemenristek	2,54	2,60	2,86	3,42	2,08
11	Kemenhub	2,63	2,80	2,43	2,63	2,92
12	Kemenkominfo	2,63	2,67	2,62	3,00	2,42
13	Kemenkumhan	3,02	2,65	2,29	2,56	2,75
14	Kemeneg KUKM	2,25	2,60	2,62	3,00	2,08
15	Kementan	2,42	2,60	2,67	2,56	2,17
16	Kemendag	1,98	2,08	2,69	2,80	2,40
17	Kemenkes	2,44	2,40	2,68	2,72	2,63
18	Kemenag	2,29	2,47	2,33	3,08	1,58
19	Kemeneg BUMN	1,58	2,00	2,24	3,38	1,92
20	Kemeneg PAN	1,63	1,90	2,57	2,57	1,88
21	Kemeneg LH	1,88	2,13	2,51	1,89	1,83
22	Kemen Budpar	1,80	1,93	2,43	1,92	1,75
23	Kemendagri	1,97	1,85	2,32	2,00	1,56
24	Kemenhut	1,54	2,00	2,14	2,21	1,50
25	Kemeneg PDT	1,50	1,53	1,81	2,15	2,00
26	Kemeneg Pera	1,38	1,87	2,00	2,38	1,33
27	Kemenegpora	1,54	2,07	1,57	1,88	1,58
	Rata-rata	2,36	2,49	2,58	2,74	2,29

Sumber: Buku Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010, hal. 53 (diolah)

4.2 Pembahasan

Pengujian perbedaan pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan akan dilakukan melalui uji statistik dengan memberikan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut:

H_0 adalah tidak terdapat perbedaan pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

H_1 adalah terdapat perbedaan pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Sebelum dilakukan pengujian, maka perlu dilakukan pengkonversian data terlebih dahulu untuk data pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah tersebut dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dalam pengkonversian ini, data pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia untuk masing-masing aspek yang diobservasi digantikan dengan *ranking*-nya dalam satu rangkaian (satu baris). Data yang terbesar digantikan dengan *ranking* satu, yang setingkat di bawah yang terbesar dengan *ranking* dua, dan yang terkecil dengan *ranking* N. Apabila memiliki nilai *ranking* yang sama maka nilai *ranking*-nya di rata-rata.

Tabel 4-2: ASPEK IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA LEMBAGA PEMERINTAH DAN RANKINGNYA

Lembaga	Implementasi <i>e-Government</i>				
	Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan
	Ranking	Ranking	Ranking	Ranking	Ranking
Kemendiknas	2	4,5	3	4,5	1
Kemenkeu	5	3	2	4	1
Kemenpu	3	4	5	2	1
Kemenhan	5	4	2	3	1
Kemenperin	2	3	4	1	5
Bappenas	4	5	3	1,5	1,5
Kemenakertrans	2	3	5	4	1
Kemensos	3	4	1	2	5
Kem ESDM	5	1	3	2	4
Kemenristek	4	3	2	1	5
Kemenhub	3,5	2	5	3,5	1
Kemenkominfo	3	2	4	1	5
Kemenkumhan	1	3	5	4	2
Kemeneg KUKM	4	3	2	1	5
Kementan	4	2	1	3	5
Kemendag	5	4	2	1	3
Kemenkes	4	5	2	1	3
Kemenag	4	2	3	1	5

Kemeneg BUMN	5	3	2	1	4
Kemeneg PAN	5	3	1,5	1,5	4
Kemeneg LH	4,5	2	1	3	4,5
Kemen Budpar	4	2	1	3	5
Kemendagri	3	4	1	2	5
Kemenhut	4	3	2	1	5
Kemeneg PDT	5	4	3	1	2
Kemeneg Pera	4	3	2	1	5
Kemenegpora	5	1	4	2	3
Rata-rata	4	3	2	1	5
	105	81	70,5	52,5	97
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅

Dari hasil pengkonversian data pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia yang disajikan pada tabel 4-2, dapat diperoleh nilai n , k dan R_j yang digunakan untuk perhitungan dalam pengujian Friedman sebagai berikut:

$R_1=105$ adalah jumlah nilai *ranking* dari pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah untuk aspek kebijakan.

$R_2=81$ adalah jumlah nilai *ranking* dari pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah untuk aspek kelembagaan.

$R_3=70,5$ adalah jumlah nilai *ranking* dari pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah untuk aspek infrastruktur.

$R_4= 52,5$ adalah jumlah nilai *ranking* dari pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah untuk aspek aplikasi.

$R_5=97$ adalah jumlah nilai *ranking* dari pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah untuk aspek perencanaan.

Dengan memasukkan nilai-nilai dari hasil pengkonversian data pencapaian implementasi *e-Government* pada tabel 4-2 ke dalam persamaan (3-1), maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\chi^2_r = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k (R_j)^2 - 3n(k+1)$$

$$\chi^2_r = \frac{12}{(27)(5)(5+1)} [(105)^2 + (81)^2 + (70,5)^2 + (52,5)^2 + (97)^2 - 3(5)(5+1)]$$

$$\chi^2_r = 522,52$$

Dari tabel Chi-Kuadrat untuk derajat kebebasan $(db) = (k-1)$ dan tingkat signifikan $\alpha=0,05$ diperoleh nilai $\chi^2_{\alpha,k-1} = 9,488$. Dengan membandingkan hasil perhitungan $\chi^2_r = 522,518$ dan nilai $\chi^2_{\alpha,k-1} = 9,488$ terlihat bahwa nilai perhitungan lebih besar dari nilai Chi-Kuadrat tabel ($\chi^2_r = 522,518 > \chi^2_{\alpha,k-1} = 9,488$). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak pada tingkat signifikan tersebut dan H_1 diterima. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan pencapaian implementasi *e-Government*

pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Perbedaan pencapaian implementasi *e-Government* tersebut secara kuantitatif dapat dilihat dari tingkat capaian kelima aspek implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia sebagaimana tertera pada tabel 4-1, yakni aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

4.2.1 Aspek Kebijakan

Secara kuantitatif tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada 27 lembaga pemerintah Indonesia memperlihatkan bahwa sebanyak 52% lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasinya dapat dikatakan baik (Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kemenristek, Kemenhub, Kemenkominfo, dan Kemkumham), 44% lembaga pemerintah dengan tingkat pencapaian kurang baik (Kemen ESDM, Kemeneg KUKM, Kementan, Kemendag, Kemenkes, Kemenag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemenhut, Kemenpora, Kemeneg PDT), dan 4% lembaga pemerintah ternyata pencapaiannya masih sangat kurang baik (Kemeneg Pera). Nilai persentase ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah Indonesia dapat dikatakan baik. Meskipun masih ada beberapa lembaga pemerintah yang tingkat pencapaiannya dapat dikatakan masih kurang baik, bahkan ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasinya justru masih sangat kurang baik.

Dalam aspek kebijakan ini, lembaga pemerintah Indonesia yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government* masih kurang berhasil dengan baik ataupun sangat kurang baik, kemungkinan terjadi karena adanya beberapa lembaga yang belum/tidak memiliki dokumen-dokumen resmi, seperti: *blueprint*/Renstra, surat keputusan, peraturan, pedoman untuk penentuan dan penetapan arah/ tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya. Kondisi tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah untuk aspek kebijakan ini memperlihatkan masih jauh dari harapan, dan dapat menimbulkan adanya perbedaan persepsi dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*, sehingga dalam implementasi atau pelaksanaannya bisa menjadi tidak terarah, tidak terkoordinasi dan tidak terpadu serta tidak terintegrasi. Bahkan dengan tidak dimilikinya dokumen-dokumen resmi tersebut, ada kemungkinan program kerja dan tata cara dalam pelaksanaan *e-Government* bisa jadi tidak sesuai dengan arah dan tujuan implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya, hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan *e-Government*-nya menjadi kurang efektif dan efisien. Di sisi lain, ternyata lebih dari separuh lembaga pemerintah telah mencapai tingkat pencapaian implementasi *e-Government* yang dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh adanya beberapa lembaga pemerintah yang telah menentukan dan menetapkan serta menyediakan berbagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal dan dapat dijadikan sebagai acuan arah dan tujuan dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa secara umum pencapaian implementasi *e-Government* untuk aspek kebijakan pada lembaga pemerintah dapat dikatakan berhasil dengan baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan jika memungkinkan perlu dilakukan peningkatan agar tingkat pencapaian pengembangan dan implementasi *e-Government*-nya menjadi sangat baik. Adapun bagi lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya masih kurang baik ataupun sangat kurang baik, Pemerintah perlu memberikan perhatian dan harus segera diantisipasi serta dipertimbangkan sedini mungkin untuk dicarikan solusi alternatifnya dengan mempercepat dan meningkatkan pengembangan dan implementasi *e-Government*. Solusi alternatif semacam ini adalah sangat strategis dan sangat diperlukan untuk mengakselerasi kesiapan perwujudan *e-Government* di Indonesia, karena lembaga-lembaga pemerintah tersebut ternyata juga masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan keseriusan yang lebih di dalam mengembangkan *e-Government* khususnya dalam aspek kebijakan dengan konsep *e-Government* yang jelas, agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan arah dan tujuan dalam implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya. Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, akselerasi dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* dari aspek kebijakan harus segera ditindaklanjuti, karena *e-Government* ternyata termasuk dalam salah satu rencana kerja yang dicanangkan dalam *Plan of Action* hasil WSIS fase Jenewa. Jadi dengan akselerasi ini diharapkan akan dapat mempercepat dukungan *e-Government* Indonesia terhadap WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

4.2.2 Aspek Kelembagaan

Berbeda dengan aspek kebijakan, karena untuk aspek kelembagaan ini ternyata tidak ada satu lembaga pemerintahpun yang tingkat pencapaian implementasinya sangat kurang baik, karena tingkat pencapaian *e-Government* untuk aspek kelembagaan pada lembaga pemerintah ini hanya masuk dalam kategori baik dan kurang baik. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri, karena dari tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada 27 lembaga pemerintah memperlihatkan bahwa ada sebanyak 56% lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasinya telah berhasil dengan baik (Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kemen ESDM, Kemenristek, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemkumham, Kemeneg KUKM, Kementan), dan 44% lembaga dengan tingkat pencapaian masih kurang baik (Kemendag, Kemenkes, Kemenag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemenhut, Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenpora). Nilai persentase pencapaian implementasi *e-Government* untuk aspek kelembagaan ini mencerminkan bahwa ternyata lebih dari separuh atau sebagian besar dari lembaga pemerintah telah mengimplementasikan *e-Government* dengan baik, dan hanya sebagian kecil yang implementasi *e-Government*-nyamasih kurang baik.

Dalam aspek kelembagaan ini, beberapa lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government* masih kurang baik tersebut kemungkinan terjadi karena adanya beberapa lembaga pemerintah belum/tidak memiliki organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dengan baik di lembaganya, seperti: belum adanya keberadaan organisasi struktural yang lengkap dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas,

jenjang karier, dan status kepegawaian serta kewenangan yang cukup. Kondisi ini senada dengan pendapat Devananda³¹, faktor ketidak berhasilan ini karena (1) kebijaksanaan yang berubah-ubah. Di sini, Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan organisasi yang menangani TI di Pemerintah Provinsi/Kab/kota berbeda-beda, artinya tidak ada standardisasi serta spesifikasi yang sama guna mengimplementasikan TI, dimana masing-masing pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri; dan (2) TI atau *e-Government* pada umumnya belum dimasukkan dalam rencana strategis, visi, dan misi gubernur atau bupati/walikota. Kondisi seperti ini jelas akan mengakibatkan adanya perbedaan persepsi dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*. Oleh karena itu apabila lembaga pemerintah tersebut tidak ada organisasi struktural maka ada kemungkinan lembaga tersebut tidak akan dapat melakukan tata kelola ICT, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan ICT, dan fungsi-fungsi lain dengan baik. Bahkan jika tidak ada kewenangan yang diberikan maka lembaga tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, termasuk fungsi pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implementasi ICT di lingkungan lembaganya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius, karena jika dibiarkan akan dapat mengakibatkan pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya menjadi kurang efektif dan efisien. Di sisi lain, meskipun tidak ada satu lembaga pemerintahpun yang berhasil mengimplementasikan *e-Government*-nya dengan sangat baik untuk aspek kelembagaan, namun lebih dari separuh lembaga tersebut ternyata telah berhasil mengimplementasikan *e-Government*-nya dengan baik.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa secara umum pengembangan dan implementasi *e-Government* untuk aspek kelembagaan pada lembaga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dengan baik. Oleh karena itu implementasi *e-Government* untuk aspek kelembagaan perlu dipertahankan, bahkan jika perlu ditingkatkan lagi agar ke depan tingkat pencapaiannya menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dari baik akan menjadi sangat baik. Adapun, bagi beberapa lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya masih kurang baik, maka ke depan harus segera diantisipasi dan dipertimbangkan serta ditindaklanjuti sedini mungkin untuk dicarikan solusi dengan mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat mempercepat proses pengembangan *e-Government* dengan menyiapkan struktur organisasi dan kelengkapan unit kerja dan aparaturnya agar mampu meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan ICT yang memadai untuk mendukung implementasi *e-Government*. Solusi alternatif semacam ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dan tepat untuk mengakselerasi kesiapan perwujudan *e-Government*, karena lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia ternyata memang masih membutuhkan langkah-langkah perbaikan dan keseriusan yang lebih dalam mengembangkan *e-Government* dari aspek kelembagaan. Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, akselerasi tersebut harus segera ditindaklanjuti, karena *e-Government* ternyata termasuk dalam salah satu rencana kerja yang dicanangkan dalam *Plan of Action* hasil WSIS fase Jenewa dalam membangun masyarakat informasi di tingkat negara. Jadi dengan melakukan akselerasi tersebut maka diharapkan akan dapat mempercepat dukungan *e-Government* terhadap WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

4.2.3 Aspek Infrastruktur

Berbeda dengan aspek kebijakan dan aspek kelembagaan dalam implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah, karena pada aspek infrastruktur ini ternyata ada satu lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya ternyata berhasil sangat baik. Secara umum diperlihatkan bahwa ternyata ada sebanyak 4% lembaga pemerintah yang tingkat pencapaiannya berhasil dengan sangat baik (Kemenkeu), dan 59% lembaga pemerintah dinyatakan berhasil dengan baik (Kemendiknas, Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kem ESDM, Kemenristek, Kemenkominfo, Kemeneg KUKM, Kementan, Kemendag, Kemenkes, Kemeneg PAN, Kemeneg LH), dan 37% lembaga pemerintah tingkat pencapaiannya masih kurang berhasil dengan baik (Kemenhub, Kemkumham, Kemendag, Kemenkes, Kemeneg, Kemeneg BUMN, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemenhut, Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenpora). Nilai persentase tingkat pencapaian implementasi *e-Government* ini mencerminkan bahwa ternyata ada satu lembaga pemerintah (Kemenkeu) yang telah berhasil membangun infrastruktur implementasi *e-Government*-nya dengan sangat baik. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, maka Kemenkeu ternyata jauh relatif telah siap terlebih dahulu dalam memberikan pelayanan publik, dengan menyediakan layanan publish (membangun situs untuk meluaskan informasi pemerintah), layanan interaksi (situs interaktif dengan publik) dan layanan transaksi elektronik (situs transaksi pelayanan publik, interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain). Disamping itu, untuk aspek infrastruktur ini ternyata lebih dari separuh lembaga pemerintah telah mengimplementasikan *e-Government* dengan tingkat pencapaiannya berhasil dengan baik. Namun demikian hampir sepertiga tingkat pencapaian lembaga pemerintahnya masih kurang berhasil dengan baik.

Dalam aspek infrastruktur ini, lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government* masih kurang berhasil dengan baik tersebut kemungkinan besar terjadi karena adanya beberapa lembaga pemerintah yang belum/tidak memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan ICT, misalnya: belum tersedianya jaringan komunikasi (LAN, WAN, dan akses internet), perangkat keras dan lunak pada pengguna (desktop, notebook, dan lain-lain), saluran layanan atau *service delivery channel* (berbasis web, telepon, sms dan lain-lain), dan fasilitas pendukung (AC, UPS, Genset, sarana pengamanan fasilitas lainnya). Kondisi seperti ini akan mengakibatkan adanya berbagai kendala dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* karena apabila tidak tersedia jaringan komunikasi ataupun saluran layanannya maka siapapun (masyarakat pengguna lainnya) tidak akan dapat mengakses semua informasi yang telah disediakan dan diberikan oleh lembaga pemerintah secara *online* dengan mudah, cepat dan tepat dari mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Disamping itu, antar lembaga pemerintah, atau lembaga pemerintah dengan masyarakat, dan lembaga pemerintah dengan bisnis juga tidak akan dapat melakukan interaksi maupun transaksi elektronik sama sekali. Di sisi lain, meskipun masih ada beberapa lembaga pemerintah yang masih kurang berhasil dengan baik dalam mengimplementasikan *e-Government*-nya, namun secara umum ternyata sebagian besar lembaga pemerintah tersebut telah berhasil dengan baik dalam mengimplementasikan *e-Government*-nya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya beberapa lembaga pemerintah yang

telah berhasil membangun infrastruktur jaringan komunikasinya untuk pengembangan dan pemanfaatan ICT yang mampu mendukung implementasi *e-Government*.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah Indonesia untuk aspek infrastruktur ternyata lebih dari separuh dapat dikatakan baik, bahkan ada satu lembaga pemerintah yang pencapaian implementasi *e-Government*-nya berhasil baik. Kondisi semacam ini perlu dipertahankan bahkan jika perlu ditingkatkan agar pencapaian implementasi *e-Government*-nya menjadi sangat baik. Disamping itu, bagi lembaga pemerintah yang pencapaian implementasi *e-Government*-nya masih kurang berhasil dengan baik, maka harus segera dipertimbangkan dan diantisipasi serta ditindaklanjuti sedini mungkin untuk dicarikan solusi alternatifnya dengan mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat mempercepat proses pengembangan *e-Government* dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai dengan standar internasional, agar mampu meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan ICT yang mampu mendukung implementasi *e-Government*. Solusi semacam ini merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan tepat untuk mengakselerasi kesiapan implementasi *e-Government* dalam mendukung WSIS dalam mewujudkan masyarakat informasi. Hal ini karena lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia tersebut memang masih membutuhkan langkah-langkah perbaikan dan keseriusan yang lebih dari aspek infrastruktur dalam mengembangkan *e-Government*. Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, akselerasi dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* harus segera ditindaklanjuti, karena *e-Government* ternyata termasuk salah satu dalam rencana kerja yang dicanangkan dalam *Plan of Action* hasil WSIS fase Jenewa dalam rangka mengkoneksikan seluruh lembaga/instansi nasional, regional dan internasional. Jadi dengan melakukan akselerasi tersebut diharapkan akan dapat mempercepat dukungan *e-Government* terhadap WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

4.2.4 Aspek Aplikasi

Tingkat pencapaian lembaga pemerintah dalam implementasi *e-Government*-nya untuk aspek aplikasi ini, ternyata berbeda dengan ketiga aspek sebelumnya, yakni aspek kebijakan, aspek kelembagaan, dan aspek infrastruktur. Kondisi ini terlihat bahwa dari 27 lembaga pemerintah ternyata 74% lembaga pemerintah pencapaian implementasi *e-Government*-nya berhasil dengan baik (Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kem ESDM, Kemenristek, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemkumham, Kemeneg KUKM, Kementan, Kemendag, Kemenkes, Kemenag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN), dan 26% lembaga pemerintah dinyatakan masih kurang baik (Kemeneg LH, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemenhut, Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenpora). Nilai persentase pencapaian implementasi *e-Government* untuk aspek aplikasi ini mencerminkan bahwa ternyata hampir tiga perempat dari total lembaga pemerintah di Indonesia tingkat pencapaian *e-Government*-nya telah berhasil dengan baik, meskipun masih ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian *e-Government*-nya masih kurang baik.

Dalam aspek aplikasi ini, beberapa lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government* masih kurang baik tersebut terjadi kemungkinan besar karena

adanya beberapa lembaga pemerintah yang belum menyediakan berbagai aplikasi yang mendukung layanan *e-Government*, misalnya: pelayanan public, administrasi dan manajemen, legislatasi, pembangunan, keuangan, kepegawaian, pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, baik secara langsung atau tidak langsung. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan adanya berbagai kendala dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* sehingga apabila aplikasi yang tersedia tidak dapat berfungsi dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemenuhan kepentingan yang dilayani, tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur dan tingkat kompetensi SDM, dan tidak mau mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah, maka interaksi yang nyaman, transparan, dan murah antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan masyarakat, dan lembaga pemerintah dengan perusahaan bisnis tidak akan dapat dilakukan sama sekali.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keberhasilan lembaga pemerintah dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* untuk aspek aplikasi sebagian besar dapat dikatakan baik, meskipun masih ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang dinyatakan kurang baik. Kondisi semacam ini perlu dipertimbangkan, bahkan untuk lembaga pemerintah yang sudah baik dipertahankan dalam implementasi *e-Government*-nya, dan jika perlu ditingkatkan lagi agar implementasinya menjadi sangat baik sehingga semakin lebih efektif dan efisien. Disamping itu, bagi lembaga pemerintah yang pencapaian implementasi *e-Government*-nya masih kurang baik, maka harus segera diantisipasi dan dipertimbangkan serta ditindaklanjuti sedini mungkin untuk dicarikan solusi alternatifnya dengan mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat mempercepat proses pengembangan *e-Government* dengan cara membangun dan menyediakan berbagai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, agar dapat meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan ICT yang mampu mendukung implementasi *e-Government*. Solusi semacam ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting untuk mengakselerasi kesiapan perwujudan implementasi *e-Government* dalam mewujudkan masyarakat informasi. Hal ini karena lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia tersebut ternyata memang masih membutuhkan langkah-langkah perbaikan dan keseriusan yang lebih dalam mengembangkan *e-Government* khususnya dalam aspek aplikasi. Oleh karena itu akselerasi solusi dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* tersebut harus segera ditindaklanjuti, karena *e-Government* ternyata termasuk salah satu dalam rencana kerja yang dicanangkan dalam *Plan of Action* hasil WSIS fase Jenewa. Jadi dengan melakukan akselerasi tersebut maka diharapkan akan dapat mempercepat dukungan *e-Government* terhadap WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

4.2.5 Aspek Perencanaan

Berbeda dengan keempat aspek sebelumnya, yakni aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan aplikasi. Kondisi ini terlihat bahwa dari 27 lembaga pemerintah ternyata 19% lembaga pemerintah tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya dapat dikatakan telah berhasil sangat baik (Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, Kemenhan, Kemenakertrans), 19% lembaga pemerintah dinyatakan baik (Bappenas, Kem ESDM, Kemenhub, Kemkumham, Kemenkes), dan 58% lembaga pemerintah dinyatakan kurang baik (Kemenperin, Kemensos, Kemenristek, Kemenkominfo, dan Kemeneg KUKM, Kemenhut, Kementan, Kemendag, Kemeneg, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemeneg

PDT, Kemenpora), dan 4% lembaga pemerintah dinyatakan masih sangat kurang baik (Kemeneg Pera). Nilai persentase pencapaian implementasi *e-Government* untuk aspek perencanaan ini mencerminkan bahwa ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, bahkan ada juga beberapa lembaga justru telah berhasil dengan sangat baik. Namun demikian keadaan di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari separuh (sebagian besar) lembaga pemerintah dalam implementasi *e-Government*-nya masih kurang baik, bahkan ada satu lembaga yang justru masih sangat kurang baik yang ke depan masih perlu peningkatan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam aspek perencanaan ini, lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government* dinyatakan kurang baik tersebut kemungkinan besar terjadi karena adanya beberapa lembaga pemerintah yang perencanaannya tidak terkait dengan tata kelola dan manajemen perencanaan *e-Government* yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan adanya berbagai kendala dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah. Oleh karena itu apabila tidak ada proses perencanaan untuk pengembangan dan implementasi *e-Government* yang baik maka tidak ada tata cara atau mekanisme kerja yang baku dan teratur dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*. Bahkan jika tidak ada kajian kebutuhan dan strategi penerapan *e-Government* yang lengkap dan jelas, maka pengembangan dan implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah tersebut tidak akan mengacu pada tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa mendatang. Di sisi lain, meskipun ada beberapa lembaga pemerintah yang masih kurang berhasil, bahkan ada satu lembaga yang sangat kurang berhasil dalam mengimplementasikan *e-Government*-nya dari aspek perencanaan, namun ternyata ada sebagian kecil lembaga pemerintah berhasil dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* dengan baik dan bahkan sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya beberapa lembaga pemerintah yang telah berhasil menyusun rencana pengembangan dan implementasi *e-Government* yang dapat dijadikan sebagai acuan manajemen perencanaan ICT dalam mendukung implementasi *e-Government* di lembaganya secara terpadu dan berkesinambungan sehingga akan semakin lebih efektif dan efisien.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pencapaian lembaga pemerintah dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* untuk aspek perencanaan sebagian besar dapat dikatakan masih kurang baik, bahkan ada satu lembaga lagi yang pencapaian implementasi *e-Government*-nya justru dinyatakan sangat kurang baik. Meskipun demikian, ada beberapa lembaga pemerintah yang telah berhasil dengan baik dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*-nya, dan bahkan berhasil sangat baik. Kondisi semacam ini perlu dipertimbangkan, bahkan lembaga pemerintah yang sudah baik dalam implementasi *e-Government*-nya dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan lagi agar implementasi *e-Government*-nya menjadi sangat baik sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien. Disamping itu, bagi lembaga pemerintah yang implementasi *e-Government*-nya masih kurang baik, maka harus segera diantisipasi dan dipertimbangkan serta ditindaklanjuti sedini mungkin untuk dicarikan solusi yang tepat dengan mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat mempercepat proses pengembangan *e-Government* dengan menyusun dan merumuskan perencanaan dalam

pengembangan dan implementasi *e-Government* yang terkait dengan manajemen perencanaan ICT. Disamping itu juga perlu melakukan kajian kebutuhan dan strategi penerapan ICT yang lengkap terutama yang terkait dengan tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, dan lain-lain untuk mendukung implementasi *e-Government* di lembaganya pada masa mendatang. Solusi semacam ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting untuk mengakselerasi kesiapan implementasi *e-Government* dalam mewujudkan masyarakat informasi. Hal ini karena lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia tersebut memang masih membutuhkan langkah-langkah perbaikan dan keseriusan yang lebih dalam mengembangkan *e-Government* khususnya dalam aspek perencanaan. Oleh karena itu akselerasi solusi tersebut harus segera ditindaklanjuti, karena *e-Government* ternyata termasuk salah satu dalam rencana kerja yang dicanangkan dalam *Plan of Action* hasil WSIS fase Jenewa. Jadi dengan melakukan akselerasi tersebut maka diharapkan akan dapat mempercepat dukungan *e-Government* terhadap WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Dari gambaran hasil analisis tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dapat diinterpretasikan bahwa ternyata 52% dari 27 lembaga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, sedangkan 48% selebihnya masih belum berhasil dengan baik. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh lembaga pemerintah telah berhasil dalam pencapaian implementasi *e-Government*, meskipun masih ada sebagian kecil lembaga yang belum berhasil dalam implementasi *e-Government*, misalnya pengembangan *e-Government*-nya masih berada pada tingkat persiapan (pembuatan situs untuk sarana akses) dan pematangan (pembuatan situs interaktif). Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa ternyata masih ada lembaga pemerintah yang berada pada tahap pembangunan situs web, tetapi ada juga yang telah mampu memberikan layanan interaktif dengan meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya Kemendiknas dan Kemenpu dengan memberikan situs interaktif dengan publik serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain (*chatting, tele-conference*, dan lain-lain). Bahkan ada juga lembaga pemerintah yang telah mampu melakukan transaksi elektronik, dengan menyediakan layanan pemerintah secara *online*, misalnya Kemenkeu berhasil membangun situs transaksi pelayanan publik serta interoperability dengan lembaga lain (layanan terbatas pada sesuatu yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya). Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pencapaian implementasi *e-Government*-nya, dimana ada beberapa lembaga pemerintah yang tingkat pencapaiannya melaju sangat cepat tetapi ada juga yang masih jauh tertinggal dalam implementasi *e-Government*. Di samping itu, pencapaian implementasi *e-Government* dari kelima aspek memperlihatkan bahwa (a) aspek kebijakan, ternyata Kemendiknas, Kemenpu, Kemenkeu, Kemenperin, Depkumham merupakan lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya jauh lebih baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya; (b) aspek kelembagaan, ternyata Kemenkeu, Kemendiknas, Kemenpu, Kemenperin, Kemen ESDM merupakan lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya jauh lebih baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya; (c) aspek infrastruktur, ternyata Kemenkeu, Kemendiknas, Kemenhan, Kemenpu, dan Kemensos merupakan lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya lebih baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya; (d) aspek aplikasi, ternyata Kemenpu, Kemenkeu,

Kemenperin, Kemendiknas, dan Bappenas merupakan lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya jauh lebih baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya; dan (e) aspek perencanaan, ternyata Kemenkeu, Kemenakertrans, Kemenpu, Kemendiknas, dan Kemenhan merupakan lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya sangat jauh lebih baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya.

Secara umum hasil analisis deskriptif tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah untuk kelima aspek memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan. Secara umum Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, dan Kemenhan merupakan lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya jauh lebih baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia yang telah melaju dengan cepat, tetapi ada juga yang masih ketinggalan. Untuk itu ke depan Indonesia perlu mempertimbangkan dan segera menindaklanjuti dengan mengakselerasi implementasi *e-Government* pada setiap lembaga pemerintah tersebut, dengan cara: (a) Merumuskan kebijakan dengan menyusun rencana strategis pengembangan dan implementasi *e-Government* dengan *blueprint* yang jelas pada masing-masing lembaga pemerintah agar menjadi dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah atau tujuan pengembangan *e-Government* di lingkungan lembaganya, (b) Menempatkan organisasi struktural pada setiap lembaga pemerintah sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga dengan melengkapi tugas pokok dan fungsi, jenjang karier dan status kepegawaian serta kewenangan yang jelas untuk mempermudah koordinasi pada tingkat eksternal maupun internal; (c) Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi dengan membangun *website* untuk komunikasi dan memberikan pelayanan publik, membangun LAN dan WAN serta jaringan privat (*privat network*), menyediakan saluran layanan dengan standar internasional agar masyarakat dapat mengakses secara *online* dengan berbasis *web* selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu; (d) Membangun berbagai jenis dan bentuk aplikasi untuk menjalankan fungsi *e-Government* yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah; dan (e) Merencanakan pengembangan dan implementasi *e-Government* yang berkaitan dengan tata kelola atau manajemen ICT secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

4.3 Dukungan *E-Government* Dalam WSIS Untuk Mewujudkan Masyarakat Informasi

Era informasi yang ditandai dengan berkembangnya masyarakat dunia yang berpengetahuan telah menjadi tuntutan semua negara, bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Konferensi-konferensi Tingkat Tinggi yang diberi nama KTT Masyarakat Informasi telah menyetujui terbentuknya masyarakat informasi di seluruh dunia yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan di seluruh negara-negara dunia untuk mengembangkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang pesat dan maju di negara-negara yang ada di dunia, seperti negara-negara Eropa dan Amerika kini telah menjalar ke negara-negara Asia yaitu Jepang, China, Korea Selatan dan India. Semua ini memang tak lepas dari peran positif globalisasi dan pengembangan ICT. Melihat

perkembangan yang pesat di bidang ICT ini pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui program KTT perlu menyelenggarakan secara khusus agenda tersebut yang diberi nama dengan KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society* (WSIS)³². WSIS ini merupakan sebuah *milestone* yang penuh dengan janji, komitmen jangka pendek dan panjang, deklarasi berbagai *stakeholder* dunia dan tokoh dunia, dalam mempersiapkan organisasi raksasa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyongsong era masyarakat informasi global³³.

Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, negara-negara di dunia secara bersama-sama melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (*UN:United Nations*) ICT mencanangkan *Millenium Development Goals* (MDG). Dalam rangka mendukung WSIS untuk pencapaian MDG tersebut, kini berbagai Negara di belahan dunia telah mengimplementasikan *e-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, dimana tujuan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Bahkan beberapa negara maju dan negara berkembang hingga saat ini masih terus melaksanakan pengembangan *e-Government* sesuai dengan karakteristik negara masing-masing³⁴.

Dalam rangka mempercepat realisasi target WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi, Indonesia melalui pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan juga Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga. Kedua kebijakan tersebut merupakan suatu bukti nyata dari keinginan pemerintah yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga pemerintah di Indonesia dalam implementasi *e-Government*. Keberhasilan implementasi *e-Government* tersebut akan sangat tergantung dari kesiapan masing-masing lembaga dalam membangun dan mengembangkan *e-Government*³⁵.

Beberapa lembaga pemerintah telah menerapkan *e-Government* dan memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Pada tahun 2006 majalah *Warta Ekonomi* menyelenggarakan *Warta Ekonomi E-Government Award* yang memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga pemerintah terbaik yang mengimplementasikan tata cara pemerintahan secara elektronik (*e-Government*)³⁶. Pencapaian usaha Indonesia dalam mewujudkan masyarakat informasi meliputi: pendidikan, *literacy rate*, penetrasi surat kabar, penetrasi internet ke pendidikan, program studi ICT, telekomunikasi, radio dan televisi, komputer, internet, belanja ICT pemerintah pusat, *e-Government*, hukum dan peraturan, dan restrukturisasi komunikasi³⁷. Jadi keberhasilan implementasi *e-Government* ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pencapaian usaha mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Sejak dikeluarkannya Inpres tersebut telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs yang merupakan tahapan dalam pengembangan *e-Government*. Berdasarkan data dari Depkominfo pelaksanaan *e-Government* di Indonesia hingga akhir tahun 2005, bahwa Indonesia memiliki: (a) 564

domain go.id, (b) 295 *website* pemerintah pusat dan pemda, (c) 226 *website* telah mulai memberikan layanan publik melalui *website*, dan (d) 198 *website* pemda masih dikelola secara aktif³⁸. Berdasarkan hasil pengamatan Kementerian Komunikasi dan Informasi, menunjukkan bahwa mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat persiapan, dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat pematangan (layanan interaktif, misalnya pemrosesan/pengumpulan formulir secara *online*), sedangkan tingkat pematapan (transaksi layanan publik, misalnya pembayaran) dan tingkat pemanfaatan (aplikasi layanan G2G, G2B, dan G2C) belum tercapai. Disamping itu berdasarkan catatan Kementerian Kominfo sebagaimana terhubung ke situs indonesia.go.id, ternyata hanya ada 6 Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara yang memiliki situs. Sementara itu, hanya 24 dari 27 kementerian yang mempunyai situs. Untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen semua memiliki situs. Sedangkan untuk Kedutaan Besar RI, dari 118 baru 10 KBRI saja yang *online*. Dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ada di Indonesia (384 pemda), jumlah situs yang dibuat ada 182 situs, dimana kondisinya 150 situs dapat dibuka dan sisanya 32 situs tidak bisa dibuka.

Posisi Indonesia dalam pencapaian masyarakat informasi, berdasarkan data di lapangan setelah lebih dari 7 (tujuh) tahun tentang implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia sebagaimana disajikan pada tabel 4-1, terlihat bahwa lebih dari separuh sebagian besar lembaga pemerintah (52%) memang dapat dikatakan telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*-nya, tetapi masih ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang belum berhasil dengan baik (44%) bahkan 4% sangat kurang baik dalam implementasi *e-Government*-nya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan dan implementasi *e-Government* di Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan dalam mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi, sebagaimana yang dideklarasikan pada forum WSIS.

Meskipun Indonesia telah memiliki prestasi yang lumayan, tetapi peringkat Indonesia pada tingkat dunia dari tahun ke tahun masih mengalami penurunan. Pada tahun 2008, peringkat Indonesia pada tingkat dunia merosot menjadi posisi 106 dari 96 sebelumnya di tahun 2005, meskipun secara indeks meningkat menjadi 0.4107 dari sebelumnya 0.3819. Total negara yang berada dalam indeks berjumlah sebanyak 182 negara. Dari survei yang dilakukan UNPAN (*United Nations Online Network in Public Administration and Finance*), kesiapan penerapan *e-Government* tahun 2008 dipimpin oleh negara Swedia dengan indeks 0.9157 yang bahkan melampaui Amerika Serikat di peringkat keempat dengan indeks 0.8644. Sementara kesiapan *e-Government* terburuk diperoleh negara Chad di Afrika dengan indeks terendah 0.1047 di posisi 182. Kebanyakan negara Afrika memang terpuruk di urutan terakhir indeks survey tersebut. Peringkat *e-Government* versi PBB tingkat ASEAN³⁹, Indonesia menduduki peringkat di urutan ketujuh setelah Singapura (23), Malaysia (34), Thailand (64), Filipina (66), Brunei (87), dan Vietnam (91). Hal yang mencengangkan bahwa ternyata Indonesia hanya berada di atas Kamboja (139), Myanmar (144), Timor Leste (155), dan Laos (156).

Hasil penelitian *Waseda University Institute of e-Governmetn*⁴⁰, Tokyo, Jepang pada tahun 2009 juga merupakan salah satu bukti keberhasilan negara-negara dalam

memanfaatkan *e-Government* (termasuk keberhasilan implementasi *e-Government* Indonesia). Hasil penelitian tentang kesiapan *e-Government* terhadap 34 negara (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei, Chili, China, Fiji, Filipina, Finlandia, Hong Kong, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Perancis, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam) dari berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia menunjukkan Indonesia berada di urutan 23 negara dengan penyelenggaraan *e-Government* terbaik di atas India, Afrika Selatan, dan China yang ada di peringkat 24 sampai 26. Meskipun Indonesia turun satu peringkat dibanding perolehan pada tahun 2008, tetapi apabila dibandingkan pada tahun 2007, peningkatan kualitas *e-Government* Indonesia sudah jauh lebih baik. Karena ketika itu Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara yang diamati menjalankan *e-Government*.

Penurunan peringkat tersebut juga diperlihatkan oleh *World E-Government Development Ranking*, dimana peringkat Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, yakni peringkat ke-85 (2004), ke-96 (2005), ke-106 (2008) dan peringkat ke-109 (2010). Pada tingkat Asean tahun 2010 (tabel 4-3), peringkat *e-Government* Indonesia (109) ternyata juga jauh lebih rendah di bawah Singapura (11), Malaysia (32), Thailand (76), Filipina (78), Brunei (68), dan Vietnam (90). Meskipun peringkat yang peroleh Indonesia ini masih relatif lebih tinggi di atas Kamboja (140), Myanmar (141), Laos (151), dan Timor Leste (162). Penurunan peringkat tersebut ternyata tidak hanya dialami oleh Indonesia, karena Thailand dan Philipina ternyata juga mengalami hal yang sama, dimana Thailand turun 12 peringkat dari urutan 44 menjadi 76 dan Philipina turun 14 dari 66 menjadi 78. Penurunan peringkat tersebut menunjukkan adanya tingkat capaian implementasi *e-Government* di Indonesia yang masih rendah. Walaupun terjadi penurunan peringkat, akan tetapi keberhasilan implementasi *e-Government* tersebut sudah cukup mengindikasikan Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada upaya implementasi *e-Government* sesuai dengan target yang dicanangkan dalam *Plan of Action* yang dihasilkan WSIS fase Jenewa.

Tabel 4-3: Urutan Implementasi E-Government Pada Tingkat Asean

No	Negara	Nilai Indeks		Peringkat Dunia	
		2010	2008	2010	2008
1.	Singapore	0.7476	0.7009	11	23
2.	Malaysia	0.6101	0.6063	32	34
3.	Brunei	0.4796	0.4667	68	87
4.	Thailand	0.4653	0.5031	76	64
5.	Philippines	0.4637	0.5001	78	66
6.	Vietnam	0.4454	0.4558	90	91
7.	Indonesia	0.4026	0.4107	109	106
8.	Cambodia	0.2878	0.2989	140	139
9.	Myanmar	0.2818	0.2922	141	144
10.	Laos	0.2637	0.2383	151	156
11.	Timor Leste	0.2273	0.2462	162	155
Rata-Rata Indeks ASEAN		0.4250	0.4290		

Sumber: United Nations E-Government Survey 2010 (dolah)

Oleh karena itu perlu disadari bahwa walaupun langkah-langkah upaya implementasi *e-Government* untuk mencapai masyarakat informasi telah dilaksanakan akan tetapi jika tidak ada peningkatan dari pembangunan dan pengembangan *e-Government* yang sudah dilakukan maka akan sulit bagi Indonesia untuk dapat mencapai masyarakat informasi sebagaimana dicanangkan oleh WSIS. Apalagi pengembangan *e-Government* itu sendiri ternyata memang tidak mudah⁴¹, selain mental birokrasi yang sulit dirubah di kalangan pegawai. *E-Government* juga memerlukan skil dan kemauan kuat untuk mengembangkannya, sehingga SDM berkualitas memang sangat diperlukan. Masalah administrasi lain yang mengganjal seperti koordinasi antar instansi untuk sepakat menggunakan *e-Government* pada reformasi birokrasi memang diperlukan. Pengembangan *e-Government* sering terkendala karena masing instansi ingin mengembangkan aplikasinya, ego sentris ini sering menyebabkan biaya teknologi informasi menjadi mahal. Infrastruktur berupa jaringan juga menjadi kendala utama, karena investasi di bidang *e-Government* ini cukup mahal. Selain SDM sarana dan dana memang menjadi faktor penting, apalagi modal awal memang mesti mahal.

Untuk itu perlu dicarikan solusi alternatif pemecahannya agar implementasi *e-Government* di Indonesia semakin meningkat dan dapat mendukung dalam mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Dalam hal ini Indonesia melalui Lembaga pemerintah tetap perlu mendorong lembaga-lembaga internasional, seperti ITU, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), UNDP (*United Nations Development Programme*), dan lainnya untuk secara bersama-sama dan berkesinambungan berupaya meminimalisasi kesenjangan digital, sehingga forum WSIS pertama yang diadakan pada 2003 di Geneva dan WSIS *guidance* dalam mengkoordinasikan kegiatan kerjasama secara regional maupun internasional. Disamping itu, solusi tersebut juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kebijakan dengan konsep *e-Government* yang jelas.

Implementasi kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan belum berhasil dengan baik, dalam menggerakkan berbagai lembaga pemerintah (lintas sektor) untuk saling sinergi dan bekerja sama dalam membangun implementasi *e-Government* sehingga interoperabilitas antar aplikasi *e-Government* dapat terpadu dan terintegrasi dengan baik untuk penyediaan layanan publik. Kondisi ini terlihat dari adanya beberapa pimpinan lembaga pemerintah yang tidak memiliki konsep pengembangan (*Blue Print*) *e-Government* dengan jelas, bahkan tidak ada kebijakan yang tegas dalam penerapan *e-Government* di lingkungan lembaganya. Pada hal dalam rangka mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi tersebut, kebijakan pimpinan lembaga merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan yang sangat menentukan dalam implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya. Oleh karena itu pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam menentukan arah dan tujuan pengembangan *e-Government* harus mampu menyusun konsep pembangunan dan pengembangan *e-Government* di lingkungan lembaganya. Dalam hal ini, komitmen pimpinan lembaga dalam implementasi *e-Government* ini diharapkan akan dapat mempercepat

terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Dengan demikian kebijakan pimpinan akan menjadi suatu komitmen yang sangat penting dalam pengembangan *e-Government*, karena ada beberapa lembaga pemerintah seringkali menghadapi perlawanan dari mereka yang menentang penerapan implementasi *e-Government*-nya. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kebijakan tegas dalam hal penerapan *e-Government* di lingkungan lembaganya. Oleh karena itu dalam memasuki era informasi dewasa ini, seorang pimpinan lembaga pemerintah harus tegas, dengan kebijakan dan komitmen yang jelas agar implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

2. Anggaran yang cukup dan infrastruktur yang memadai.

Data perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih belum memadai. Jumlah sambungan telepon tetap baru 8,7 juta atau dengan tingkat teledensitas kurang dari 4 persen. Sementara pemerintah menargetkan jumlah sambungan telepon per 100 penduduk sebesar 13% pada tahun 2009. Hal itu berkebalikan dengan penetrasi telepon seluler yang telah mencapai 22,8%. Sampai saat ini terdapat sekitar 43 ribu desa atau 65% desa yang belum terjangkau oleh jaringan telepon⁴². Dari gambaran pembangunan infrastruktur yang ada, dalam mendukung WSIS terutama deklarasi prinsip-prinsip untuk mewujudkan masyarakat informasi yang terkait pentingnya infrastruktur telematika dan penyediaan akses kepada informasi dan ilmu pengetahuan dengan untuk mewujudkan masyarakat informasi maka perlu adanya infrastruktur yang memadai dalam implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah. Kondisi ini sangat penting, karena infrastruktur jaringan adalah tulang punggung yang menopang sistem *e-Government*, terutama dalam mempercepat rencana tindak WSIS pada tahun 2015 yang terkait dengan infrastruktur untuk menghubungkan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, perpustakaan serta lebih dari separuh penduduk dunia harus mempunyai akses dengan ICT. Oleh karena itu infrastruktur jaringan telekomunikasi ini harus tersedia dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga beberapa daerah dapat tersedia saluran telepon, aliran listrik, atau tersedia tempat akses yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Di Indonesia tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas. Oleh karena itu upaya penyediaan tempat akses perlu dilakukan guna menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi, seperti: kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Investasi infrastruktur jaringan untuk implementasi *e-Government* ini harganya memang relatif sangat mahal, sehingga beberapa lembaga pemerintah perlu menyiapkan anggaran (*budget*) untuk keperluan pembangunan infrastruktur *e-Government*. Penyiapan anggaran ini sangat penting, karena anggaran adalah nyawa untuk kelangsungan hidup sistem *e-Government*. Jika dikaitkan dengan kesiapan pembangunan ICT guna mencapai masyarakat informasi seutuhnya tersebut masih terbilang rendah. Alokasi Belanja ICT untuk kegiatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar pada upaya memberikan akses internet ke organisasi atau lembaga pemerintah sesuai dengan target yang

dicanangkan dalam *Plan of Action* yang dihasilkan WSIS fase Jenewa⁴³. Dalam pembangunan sistem *e-Government*, anggaran dan infrastruktur memang merupakan kunci keberhasilan, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi aplikasinya. Pembangunan infrastruktur yang handal tidak selalu memerlukan anggaran yang besar, asalkan pembangunannya dilakukan melalui perencanaan yang matang dengan memperhitungkan biaya yang dialokasikan, kondisi geografis dari lokasi lembaga pemerintah yang bersangkutan, serta aplikasi *e-Government* yang sesuai dengan kebutuhan publik. Aplikasi memiliki peran yang sangat strategis, karena merupakan jantung yang menjadi penggerak seluruh organ sistem *e-Government*. Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan *e-Government* tersebut harus berdasarkan prioritas, artinya untuk daerah yang terjangkau jaringan telekomunikasi terestrial, sebaiknya dibangun berbasis jaringan tersebut. Disamping itu, penggunaan satelit (VSAT) hanya diperuntukkan pada daerah yang benar-benar sulit dijangkau (misalnya daerah terpencil), bahkan jika perlu dilakukan melalui jaringan *dial-up*, sehingga biaya *online* akan dapat dihemat.

Pembangunan infrastruktur ini juga harus memperhatikan jalur ke publiknya, agar dapat diakses dengan mudah dan cepat secara *online* oleh siapapun dari manapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, untuk aplikasinya perlu diberikan tempat yang terbuka (umum) sebagai tempat akses dengan berbagai bentuk dan jenis layanan sesuai dengan yang dikembangkan pada *e-Government*, artinya aplikasi layanan yang pasti diakses user (pembayaran listrik, telepon, dll) dan tempat penyampaian aspirasi umum. Dengan tersedianya infrastruktur dan aplikasinya, maka pengembangan *e-Government* dalam rangka mempercepat penyampaian layanan pemerintah, memudahkan akses informasi, atau meningkatkan akses ke pemerintah secara efektif dan efisien akan segera terwujud. Oleh karena itu dengan dukungan infrastruktur *e-Government* maka setiap orang akan dapat mengakses dan berbagi informasi serta pengetahuan yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat dapat menikmati pelayanan informasi yang lebih baik, karena pelayanannya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah secara *online* tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu.

Berdasarkan data belanja ICT pemerintah pusat dalam APBN 2005 yang telah direalisasikan hampir mencapai jumlah 2,5 triliun rupiah atau mencapai 0,935 dari seluruh total belanja pemerintah pusat. Jumlah besaran belanja ICT pada tahun 2005 untuk masing-masing organisasi atau lembaga sangatlah bervariasi. Kementerian Pendidikan Nasional dengan 518,65 miliar rupiah menempati urutan teratas dalam besaran jumlah belanja ICT, diikuti Lembaga Sandi Negara dengan 370,18 miliar rupiah. Data besaran anggaran ini jauh relatif lebih kecil dibanding anggaran belanja ICT Pemerintah Singapore (620 juta dolar Singapore). Pada tahun 2003, Singapore mencanangkan proyek *e-Government* yang merupakan proyek layanan public elektronik yang mengintegrasikan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini selama tiga tahun mencapai 1,3 milyar Dolar Singapore⁴⁴. Bahkan dengan berorientasi pada langkah Singapore yang berhasil menduduki peringkat ke-10 (Implementasi E-government pada tingkat Asean), maka Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan alokasi anggaran belanja ICT dalam

jumlah yang cukup dan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi⁴⁵.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) ICT yang handal.

Sumber daya manusia adalah salah satu modal penting pembangunan. Demikian pula halnya dalam usaha mewujudkan masyarakat informasi seutuhnya di Indonesia. Perlu dipersiapkan kualitas sumber daya manusia yang memahami dan menguasai ilmu pengetahuan beserta teknologi, khususnya yang berkaitan dengan ICT⁴⁶. SDM baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-Government* merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan dan implementasi *e-Government* di Indonesia dalam mendukung WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri, karena meskipun konsep pengembangan *e-Government* sudah jelas dan dukungan anggarannya cukup dengan infrastruktur yang memadai tetapi tanpa dukungan SDM yang handal maka implementasi *e-Government* tidak akan efektif dan efisien. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *e-Government*, sehingga perlu diantisipasi dan dipertimbangkan untuk segera ditindaklanjuti dengan cara peningkatan kualitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, melalui jalur pendidikan formal dan non formal di dalam negeri ataupun di luar negeri serta pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*. Disamping itu dapat juga dilakukan dengan cara bekerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan e-government, bekerja sama dengan negara lain untuk mempromosikan pengembangan ICT dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, untuk jalur pendidikan formal, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) terdapat 555 program studi dengan jenjang pendidikan Diploma 1 hingga strata-2 yang berkaitan dengan ICT dari 7.064 program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh 1.173 institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Ini berarti 7,86% dari seluruh program studi yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang ada. Indonesia telah berada di arah yang benar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami dan menguasai ICT⁴⁷.

Disamping itu perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan ICT pada lembaga pemerintah dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*). Bahkan jika perlu dilakukan perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja yang mendukung pelaksanaan *e-Government* serta peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM ICT pada lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*. Jadi dengan peningkatan kualitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya serta pemberian penghargaan/ apresiasi SDM dalam pengembangan *e-Government* diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa $\chi_r^2 = 522,518 > \chi_{\alpha, k-1}^2 = 9,488$ untuk tingkat signifikan $\alpha=0,05$ artinya terdapat perbedaan pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Perbedaan ini terlihat dari 27 lembaga pemerintah ternyata (a) 52% lembaga pemerintah tingkat pencapaian implementasi *e-Government*-nya telah berhasil dengan baik, sedangkan 48% lembaga selebihnya masih kurang baik dalam melaksanakan implementasi *e-Government*-nya, artinya lebih dari separuh implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah telah berhasil dengan baik, meskipun masih ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang perlu peningkatan dalam implementasinya; dan (b) dari kelima aspek implementasi *e-Government* (aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan) ternyata Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, dan Kemenhan merupakan lembaga pemerintah yang jauh lebih baik dalam implementasi *e-Government*-nya dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya.

Dari data keberhasilan implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia pada tahun 2010 yang mencerminkan masih adanya 48% dari 27 lembaga pemerintah di Indonesia yang capaian implementasi *e-Government*-nya masih belum berhasil dengan baik dan juga adanya penurunan peringkat *e-Government* Indonesia pada tingkat dunia (dari 85 tahun 2004 menjadi peringkat ke-109 tahun 2010) maka dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia masih rendah atau masih jauh untuk memujudkan masyarakat informasi sebagaimana yang dideklarasikan pada forum WSIS. Untuk itu implementasi *e-Government* pada lembaga pemerintah di Indonesia tersebut perlu segera ditingkatkan agar dapat mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi, dengan cara: (a) menyusun kebijakan dengan konsep pengembangan *e-Government* yang jelas, (b) menyediakan anggaran yang cukup dan Infrastruktur yang memadai sesuai standar internasional, dan (c) meningkatkan SDM ICT yang handal melalui jalur formal maupun non formal.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Lembaga Pemerintah di Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pencapaian implementasi *e-Government* dalam mendukung WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- ¹ Qamar, Adrian Sjamsul, Alexander Rusli dan Zainal A. Hazibuan. *Analisis Transformasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Berdasarkan Target Tahun 2015*. Jurnal Sistem Informasi MTI UI, 2(2), Oktober 2006, hal 2
- ² Ibid 1, hal.1
- ³ Imran, Hasyim Ali. 2010. *Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Informasi*. <http://sipimario.blogspot.com/2010/02/masyarakat-pedesaan-dan-masyarakat.html>. Download Maret 2010
- ⁴ Hasibuan, Zainal A. 2007. *Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan e-Government Untuk Pemda*. Jurnal Sistem Informasi MTI UI, 3(1), April 2007, hal 1
- ⁵ Junis. 2007. *Implementasi e-Government Di Indonesia*. <http://www.pureportals.com/Default.aspx?tabid=210050&newsType=ArticleView&articleId=848>. Download Pebruari 2011
- ⁶ Lee, Nag Yeon. 2009. *Penerapan e-Government*. Akademi Esensi Teknologi informasi dan komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan. Asian and Pasific Training Centre For Information and Communication Technology For Development. Hal.16 <http://unapcict.org>. Download Maret 2011
- ⁷ Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- ⁸ Rahardjo, Budi. 2001. " *Membangun e-Government*". Makalah pada Seminar Nasional Jaringan Komputer II, yang diselenggarakan oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar, 19 Mei 2001. hal. 1. <http://www.geocities.com/seminartsc>. Download April 2011
- ⁹ Ibid1, hal.1
- ¹⁰ Rokhman, Ali. 2008. *Potret dan hambatan e-Government Indonesia*. <http://io.ppi.jepang.org>. Diambil tanggal 16 Februari 2009.
- ¹¹ Sudarto, Yudo. *E-Government dan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Baik*. Prosiding Konferensi nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia 3-4 Mei 2006. ITB. Hal. 44
- ¹² Forman, Mark, *e-Government: Using IT to transform the effectiveness and efficiency of government* (2005), 4. [http://siteresources.worldbank.org/INTEDEVELOPMENT/Resources/FormanEgov\(6_05\).ppt](http://siteresources.worldbank.org/INTEDEVELOPMENT/Resources/FormanEgov(6_05).ppt). Download Maret 2011
- ¹³ Ibid 3, hal 66
- ¹⁴ Ahmadjayadi, Cahyana. 2004. *Sistem Informasi Keperintahan Abad 21*. Jakarta: Kementerian Kominikasi dan Informasi.
- ¹⁵ Ibid 13, hal 8

- ¹⁶ Ibid 3, hal 68
- ¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengembangan E-Government.
- ¹⁸ Supangat, Suhono Harso; I Made Ari Jaya Negara. 2006. *Framework Strategi Implementasi e-Government*. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia, 3-4 Mei 2006, Aula Barat dan Timur ITB, hal 36
- ¹⁹ Ibid 7, hal 1
- ²⁰ Ibid 17, hal 37
- ²¹ Ibid 7, hal 2
- ²² Ibid 1, hal 1
- ²³ Ibid 1, hal 2
- ²⁴ Ibid 2, hal 4
- ²⁵ Satriya, Eddy 2004. *WSIS dan Pembangunan Telematika Nasional*. <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2764/> , Download Januari 2011
- ²⁶ Ahmadjayadi, Cahyana. 2008. *Perkembangan ICT Indonesia, Tantangan dan Peluang bagi Lulusan Politeknik Negeri Sriwijaya*, makalah Orasi Ilmiah Menteri Komunikasi dan Informatika Pada Dies Natalis Ke-26 Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang pada 18 Oktober 2008.
- ²⁷ Kominfo. 2005. *Eksekutif Summary Laporan Delegasi RI World Summit On The Information Society (WSIS) Tunis, 16-18 Nopember 2005*. http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=210. Download April 2011
- ²⁸ Ibid 1, hal. 3
- ²⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2010. *Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010*. Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- ³⁰ Djarwanto, 1995. *Statistik Non Parametrik*. Yogyakarta:BPFE. Hal 66.
- ³¹ Anonim. *IT Project Management Jangan Dilupakan*. Majalah E-Indonesia, Media ICT, Wahana Merajut Nusantara. Vol.1 No. 9 Edisi Pebruari 2006.hal.10 http://www.majalaheindonesia.com/februari2006_1.htm. Download Maret 2011
- ³² Manulu, Radot. 2010. *Pendayagunaan e-Government Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Institusi Pemerintah Daerah*. <http://www.pakkatnews.com/pendayagunaan-e-Government-untuk-mendukung-pemerintahan-yang-baik-good-governance-pada-institusi-pemerintah-daerah.html>. Diambil tanggal 15 April 2011

³³ Rusdiah, Rudi. 2006. *WSIS & Multi Stakeholders Antara Janji dan harapan*. E-Indonesia, Media ICT, Wahana Merajut Nusantara. Vol.1 No. 9 Edisi Pebruari 2006.hal.50

³⁴ Ibid 11, hal 67

³⁵ Ibid 1, hal 9

³⁶ Ibid 3, hal. 68

³⁷ Ibid 1, hal. 11

³⁸ Ibid 3, hal 68

³⁹ Indonesia di Peringkat ke 6 Implementor E-g0vernment Kawasan ASEAN. <http://plazaegov.blogspot.com/2010/01/indonesia-di-peringkat-ke-6-implementor.html>, Download April 2011

⁴⁰ Firman, Muhammad.2009. 2009, *E-Government Indonesia ke-23 Dunia*. http://teknologi.vivanews.com/news/read/85653-2009_e_government_indonesia_ke_23_dunia. Download Maret 2011

⁴¹ Sudarto, Yudo. 2006. E-Government dan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang baik. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung. Hal. 46

⁴² Maulana, Heri. 2010. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. <http://edutechpreneur.wordpress.com/2010/02/01/perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/> Download Januari 2011

⁴³ Ibid 1, hal 8

⁴⁴ Chan, I, 2004. No Cut in Government IT Bugget This Year, <http://www.zdnetasia.com/news/business/printfriendly.html?AT=39167095-39000003c> Download April 2011

⁴⁵ Ibid 1, hal 9

⁴⁶ Ibid 1, hal 5

⁴⁷ Ibid 1, hal 5

LAMPIRAN

No	NOMENKLATUR	LEMBAGA
1	Kemendiknas	Kementerian Pendidikan Nasional
2	Kemenkeu	Kementerian Keuangan
3	Kemenu	Kementerian Pekerjaan Umum
4	Kemenhan	Kementerian Pertahanan
5	Kemenperin	Kementerian Perindustrian
6	Bappenas	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
7	Kemenertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Kemensos	Kementerian Sosial
9	Kem ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Kemenristek	Kementerian Riset dan Teknologi
11	Kemenhub	Kementerian Perhubungan
12	Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
13	Kemenkumhan	Kementerian Hukum dan HAM
14	Kemeneq KUKM	Kementerian Negara Koperasi dan UKM
15	Kementan	Kementerian Pertanian
16	Kemendag	Kementerian Perdagangan
17	Kemenkes	Kementerian Kesehatan
18	Kemenag	Kementerian Agama
19	Kemeneq BUMN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
20	Kemeneq PAN	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
21	Kemeneq LH	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
22	Kemen Budpar	Kementerian Budaya dan Pariwisata
23	Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
24	Kemenhut	Kementerian Kehutanan
25	Kemeneq PDT	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
26	Kemeneq Pera	Kementerian Negara Perumahan Rakyat
27	Kemeneqpora	Kementerian Pemuda dan Olah Raga